



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

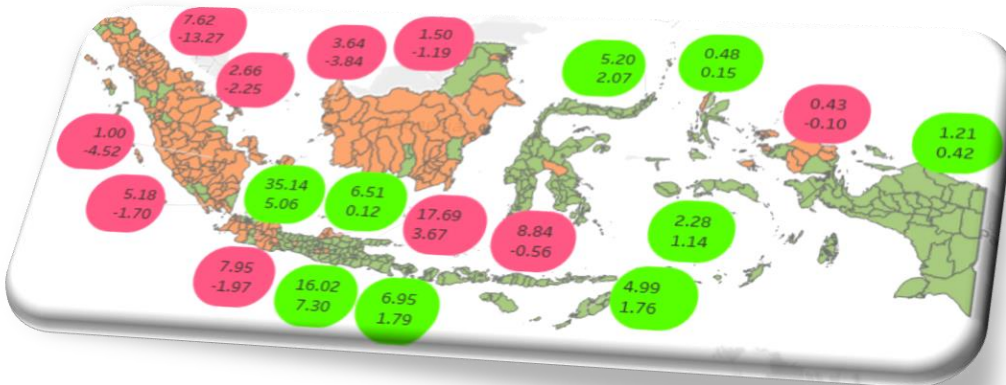
Periode 12 s.d. 23 April 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa



KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

► Perkembangan Tingkat Aktivitas Ekonomi di Daerah



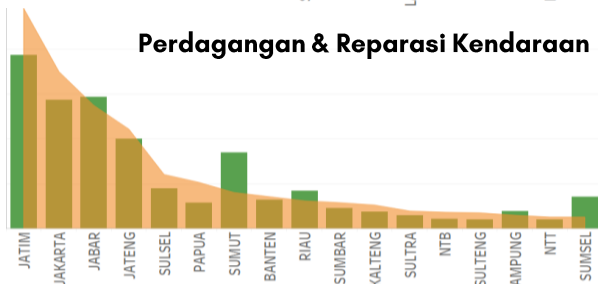
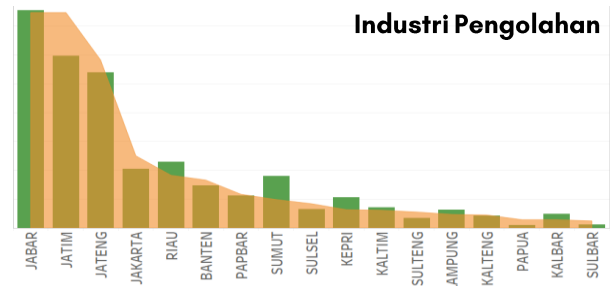
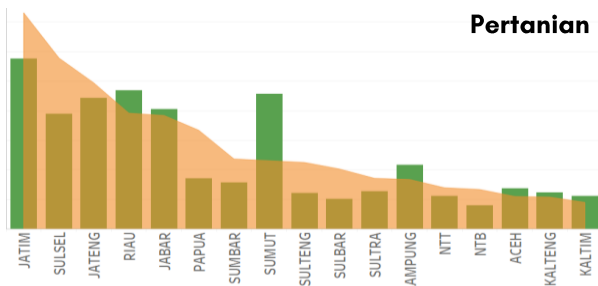
Delta Luminosity Index 10 Apr – 18 Apr



Index 18 Apr Delta Positif

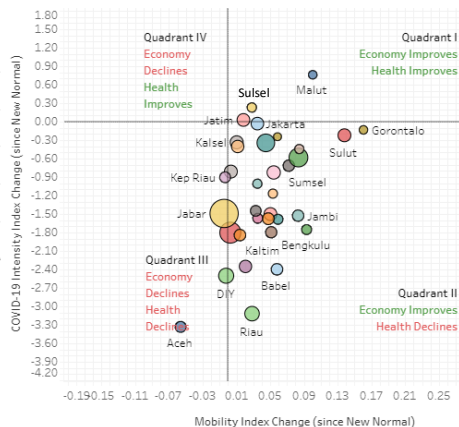
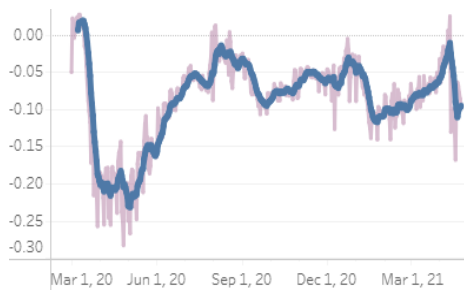
Index 18 Apr Delta Negatif

Berdasarkan nilai *luminosity index** dalam periode 10 April – 18 April 2021, **aktivitas perekonomian** di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat **mengalami penurunan**, sedangkan wilayah lain cenderung mengalami peningkatan. Kota dengan **peningkatan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Yogyakarta** (8,73 menjadi 16,02), **Mataram** (5,79 menjadi 11,33), dan **Jakarta** (30,08 menjadi 35,14). Sedangkan kota yang mengalami **penurunan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Medan** (20,89 menjadi 7,62), **Banda Aceh** (16,08 menjadi 9,04), dan **Palembang** (5,53 menjadi 1,00).



Pertanian mengalami kenaikan terbesar di **Sulsel, Jatim, dan Papua**, sedangkan **Sumut, Riau, dan Lampung** mengalami penurunan. **Industri Pengolahan** mengalami kenaikan terbesar di **Jatim, Jateng, dan Jakarta**, sedangkan **Sumut, Riau, dan Kepri** mengalami penurunan. **Perdagangan & Reparasi Kendaraan** mengalami kenaikan tertinggi di **Jatim, Jakarta, dan Papua**, sedangkan **Sumut, Sumsel, dan Jabar** mengalami penurunan.

► Indeks Mobilitas Nasional dan Daerah (24 April 2021)

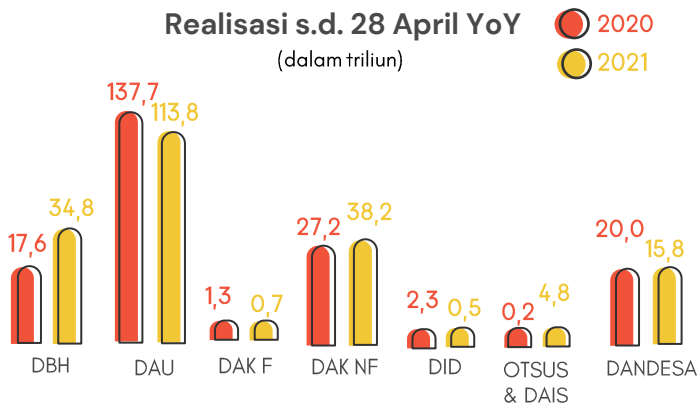


Berdasarkan nilai *mobility index** dalam periode 10 – 18 Apr 2021, **aktivitas ekonomi nasional relatif menurun** (0,006 ke -0,095). Per 24 April 2021, **Maluku Utara** dan **Sulsel** telah masuk di **kuadran I** (ekonomi dan kesehatan membaik), sedangkan **Aceh** masuk ke **kuadran III** (ekonomi dan kesehatan menurun).

*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia

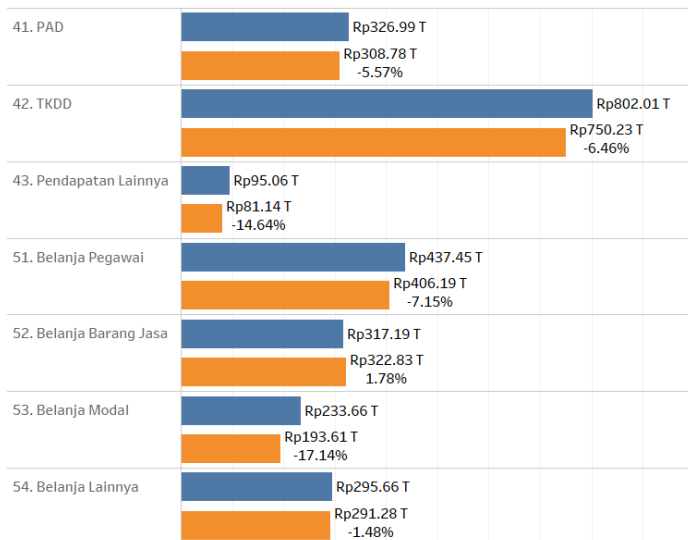
KINERJA TKDD DAN APBD

Kinerja TKDD



- Secara YoY, realisasi **April 2021** sebesar Rp208,7 T mengalami **kenaikan 1%** dibandingkan realisasi April 2020 sebesar Rp206,4 T. **Kenaikan terbesar** bersumber dari **DBH sebesar 97,4%**.
- Realisasi BLTDesa sebesar Rp1.525,0 M kepada 71.651 Desa.

Postur APBD 2021



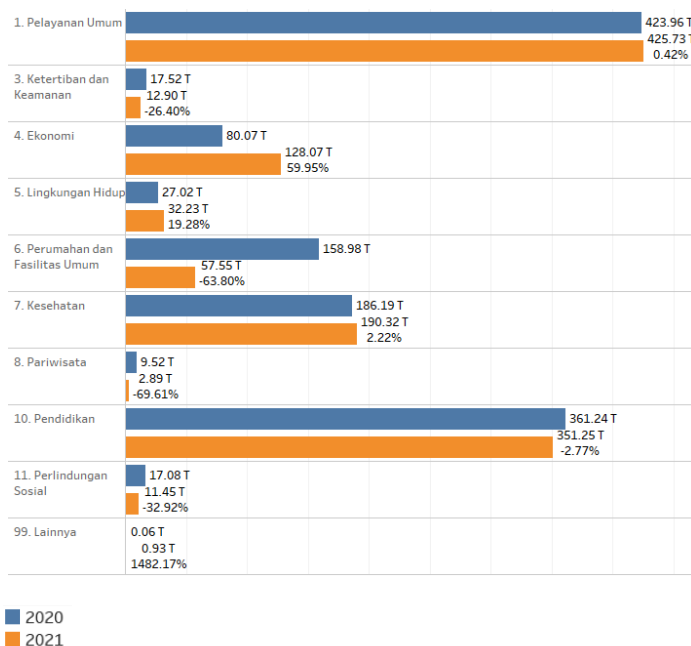
- Secara YoY, anggaran **pendapatan** pada APBD 2021 **turun** sebesar 6,85%, sedangkan **belanja turun** sebesar 5,46%.
- Target PAD turun** sebesar 5,57%, **TKDD** dianggarkan **turun** sebesar 6,46%, sedangkan **Pendapatan Lainnya turun** 14,64%.

- Jenis belanja yang **turun paling** dalam di APBD 2021 adalah **Belanja Modal** yang turun 17,14%, diikuti **penurunan Belanja Pegawai** sebesar 7,15%. Sedangkan belanja yang mengalami **kenaikan cukup signifikan** adalah **Belanja Tak Terduga** sebesar 273,91% dan **Belanja Bansos** sebesar 18,83%.

- Dalam rangka pemanfaatan alternatif pembiayaan sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi, **Penerimaan Pinjaman Daerah** naik sebesar 241,44% menjadi Rp33,63 triliun di APBD 2021.

- Belanja per Fungsi yang mengalami **penurunan terdalam** adalah **Fungsi Pariwisata** sebesar 69,61%, yang salah satunya akibat adanya reklasifikasi Urusan Budaya ke Fungsi Pendidikan di 2021, dan **Fungsi Perumahan & Fasum** sebesar 63,80%.

- Sedangkan **Fungsi Ekonomi** mengalami **kenaikan tertinggi** sebesar 59,95%, yang mengindikasikan adanya upaya dukungan APBD terhadap **upaya pemulihan ekonomi** di 2021.

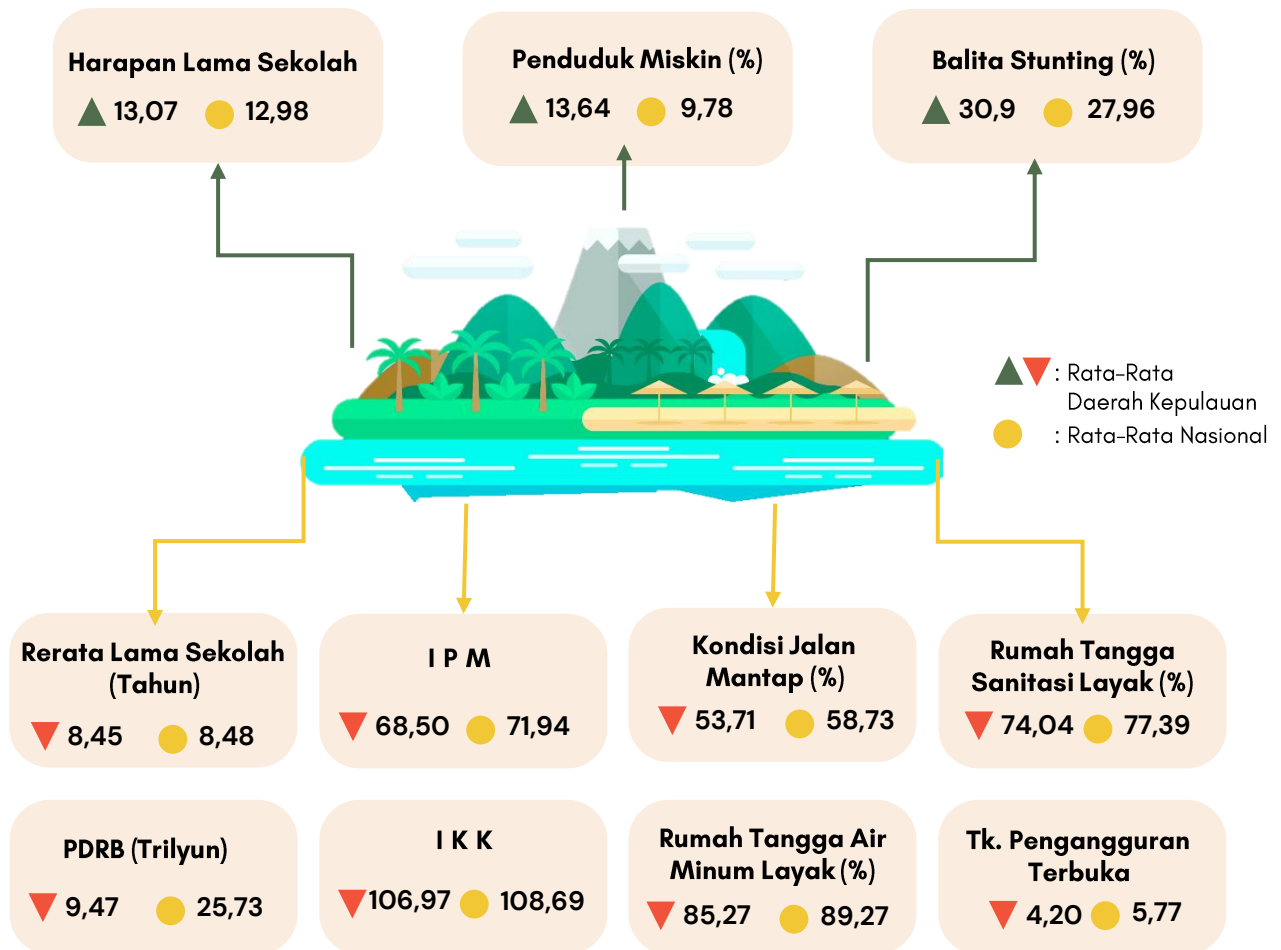


*Data bersumber dari 533 Pemda per 28 April 2021

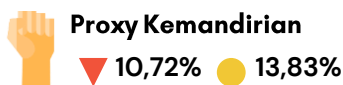
KINERJA DAERAH KEPULAUAN

Kinerja daerah-daerah kepulauan masih dibawah rata-rata nasional, baik indikator sosial ekonomi maupun kondisi infrastruktur daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan kinerja yang lebih baik, yaitu Harapan Lama Sekolah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini menunjukkan perlunya fokus pembangunan (afirmasi) terhadap daerah kepulauan.

Nilai Rata-Rata Indikator Tahun 2020



► Pada sisi fiskal daerah, APBD pada daerah-daerah kepulauan masih memiliki kemandirian yang lebih rendah dari rerata nasional. Hal ini berarti pula semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah-daerah kepulauan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat



► Pada sisi belanja K/L, realisasi penyerapan belanja K/L Tahun 2020 pada daerah-daerah kepulauan sebesar 97,69% dari pagu DIPA, lebih tinggi dari rerata nasional yaitu sebesar 94,56%. Namun sampai dengan trimester pertama 2021, realisasi penyerapan belanja K/L di daerah kepulauan masih 16,49% dari pagu DIPA atau lebih rendah dari rerata nasional.



Sumber :
APBD 2020 dari 107 daerah bercirikan kepulauan dan DJA

INOVASI DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Provinsi Sangat Inovatif

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Sesuai dengan namanya, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, dimana pulau yang telah bernama berjumlah 470 pulau dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Secara administrasi, Pemprov Babel terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Pemprov Babel saat ini selalu berupaya menunjukkan komitmen dan inovasi dalam membangun ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), melindungi kelestarian lingkungan hidup, unggul di bidang inovasi agropolitan dan pelayanan publik yang cepat berbasis teknologi.

Pemprov Babel menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai "**Provinsi Sangat Inovatif**" berdasarkan indeks inovasi daerah, dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap langkah dan semangat yang ditunjukkan oleh Pemprov Babel dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui cara-cara yang inovatif.

► Beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung:



1. Sistem Informasi Pengiriman Terpadu Bahan Tambang atau "Si Peri Terbang"

Layanan ini dihadirkan sebagai solusi atas lambatnya birokrasi pengurusan izin pertambangan di wilayah Provinsi Babel. Selama ini banyak perusahaan tambang di Bangka Belitung mengeluhkan lambatnya proses perizinan usaha tambang, karena jarak lokasi tambang yang sangat jauh dari pusat pelayanan di ibukota

kabupaten. Manfaat yang diperoleh para pelaku usaha tambang atas "Si Peri Terbang" adalah proses pengurusan izin yang biasanya memakan waktu dua hari dipersingkat menjadi 30 menit saja. Mereka juga tidak perlu mendatangi kantor unit pelayanan, karena bisa melakukan pengurusan secara online. Proses pengurusan izin yang relatif singkat ini, mengakibatkan pengiriman barang (dwelling time) di pelabuhan juga menjadi semakin cepat. Masalah pemalsuan izin dokumen pun bisa dikurangi serendah mungkin. Keberhasilan inovasi juga memperoleh penghargaan sebagai Top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2020 dari KemenpanRB RB.



2. Program Perbaikan Lingkungan Bekas Pertambangan

Pada umumnya, perusahaan tambang hanya mengambil keuntungan sepihak dari potensi alam kepulauan Babel, dan meninggalkan begitu saja bekas pertambangan. Terkait ini Pemprov Babel mendorong masyarakat agar memanfaatkan keadaan lingkungan yang rusak sebagai potensi baru untuk mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Berbagai bibit mangrove, jambu mete, dan lainnya disebar ke

berbagai daerah di Babel. Hal ini untuk memperbaiki kerusakan lingkungan bahkan menciptakan potensi wisata baru. Contohnya, pulau Anggrek Elyse Lestari yang merupakan bekas lahan yang terbakar, dijadikan sebagai lokasi wisata yang memiliki banyak potensi.



3. Program Kemitraan antara SMK dan Perangkat Daerah

agar mendukung terbentuknya sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam SMK. Tidak hanya dari tingkat sekolah menengah, pemda juga berkoordinasi pula dengan Politeknik Manufacturing Babel untuk membuat inovasi teknologi. Dengan demikian, usaha ini dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat memudahkan sistem produksi dan mendapatkan hasil produksi dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi.



4. Inovasi Penerapan Teknologi Drone pada Sektor Pertanian

Teknologi ini bertujuan untuk melakukan transformasi ekspor pada komoditas pertanian serta meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu para petani. Teknologi drone membantu memberikan gambaran tanaman mana saja yang sudah siap dibudidayakan, harus diberi pupuk, perlu diberikan perawatan khusus/antisipasi penyakit pada tanaman, sehingga dapat mencegah kegagalan-kegagalan sebelum panen. Teknologi drone ini juga mampu menyemprotkan obat dan menebar pupuk ke tanaman yang terserang penyakit atau hama.

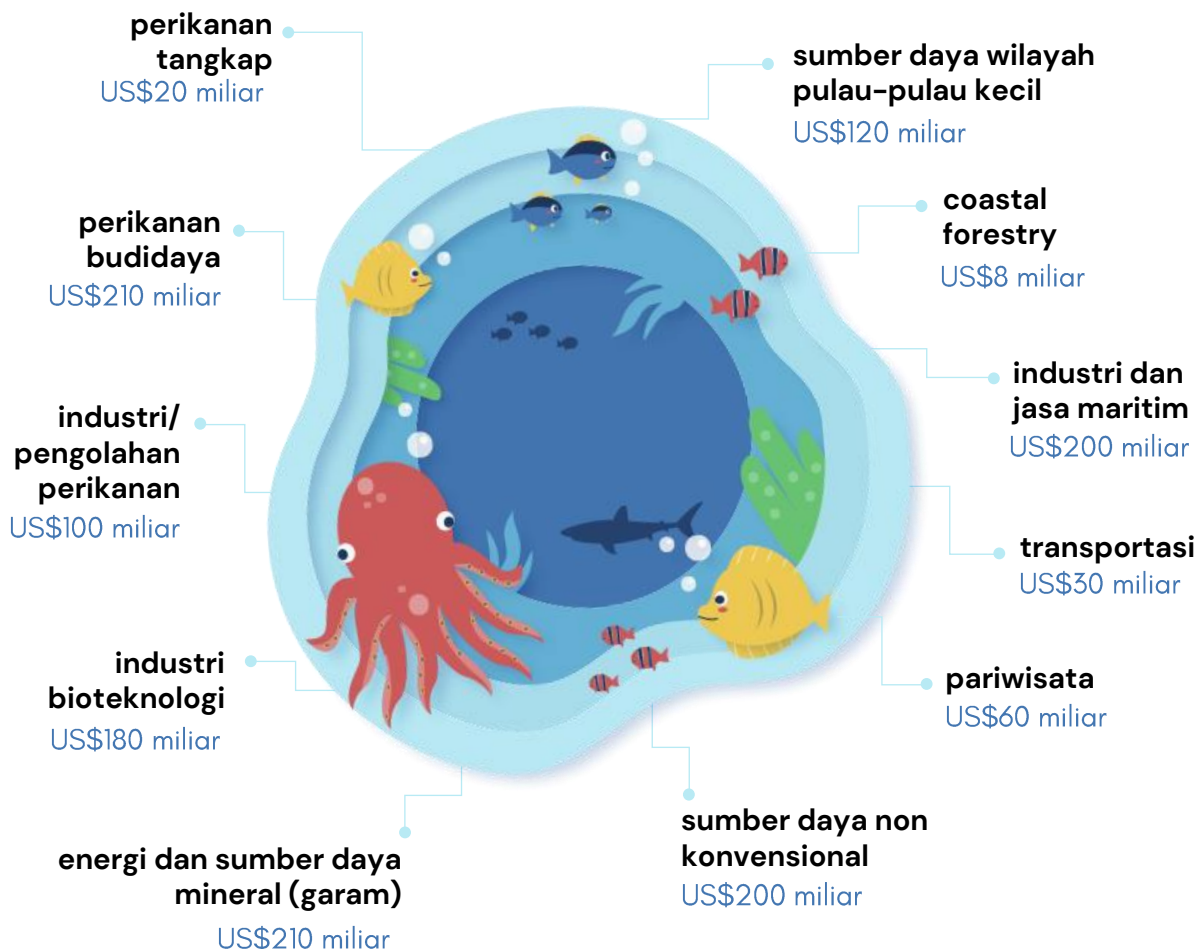
Inovasi yang telah dilaksanakan ini menjadikan Prov Kepulauan Babel mampu untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. **Persentase penduduk miskin** di Babel setiap tahun mengalami **penurunan** hingga mencapai angka **4,53 persen** tahun 2020 di bawah rata-rata nasional sebesar 10.19 persen. Diikuti dengan menurunnya ketimpangan ekonomi pada 2020 hingga mencapai angka **gini ratio** sebesar **0.269 persen**, termasuk yang terendah se-Indonesia.

Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan dua pertiga luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta km². Luasnya laut Indonesia sejalan dengan panjangnya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (54.716 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia atau negara dengan garis pantai terpanjang di Asia. Selain itu, Indonesia juga diakui internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau, Indonesia patut mendapat predikat negara kepulauan terbesar di dunia. Kekuatan inilah yang menjadi salah satu **potensi besar** yang perlu terus didorong untuk memajukan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari FAO, selama satu dasawarsa ini Indonesia menempati peringkat kedua terbesar dalam produksi perikanan di bawah China. Mengingat potensi laut yang begitu besar, tentunya daerah-daerah kepulauan yang sangat identik dengan laut tersebut perlu terus mendapatkan perhatian agar segenap potensi tersebut berkorelasi positif dengan kemajuan daerah kepulauan.

Potensi besar wilayah kepulauan dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk itu, pembangunan wilayah kepulauan perlu diintegrasikan dengan pembangunan wilayah masing-masing daerah sesuai dengan keunggulan wilayahnya. Berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan di wilayah kepulauan antara lain perikanan, rumput laut, dan hutan bakau. Potensi perikanan Indonesia tersebut masih sangat besar untuk dikembangkan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, **potensi ekonomi perikanan kelautan Indonesia diprediksi mencapai US\$1.338 miliar per tahun** (Data Estimasi KKP, 2020).

Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan



Tantangan Pengembangan Daerah Kepulauan

01. Terancamnya Sumber Daya Laut

Salah satu contohnya adalah kondisi terumbu karang yang menjadi pusat ekosistem ikan di laut. Berdasarkan hasil riset LIPI tahun 2017, status kondisi terumbu karang Indonesia kondisinya kurang baik. Hasil verifikasi dan analisis data dari 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh perairan Indonesia dilaporkan bahwa hanya sekitar 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik, kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi jelek sebesar 35,15%. Hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan perikanan laut Indonesia dimana kehidupan ikan sangat tergantung dengan kondisi terumbu karang.

► Pengelolaan daerah kepulauan memerlukan adanya perhatian yang lebih fokus dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, serta melibatkan berbagai sektor terkait agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, pengelolaan daerah kepulauan perlu memperhatikan pengaruh dari aspek lain seperti isu keamanan, sumber daya manusia, sosial budaya dan isu lingkungan. Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan daerah kepulauan menjadi salah satu fokus pembangunan Indonesia.

► 2 Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Kepulauan:

01. Koridor Pertumbuhan

dengan pendekatan koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini wilayah daerah kepulauan akan dilakukan akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, dan pariwisata.

02. Terbatasnya Infrastruktur Maritim dan Sarana Perhubungan Laut

Hal tersebut membuat biaya logistik melalui laut di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain. Infrastruktur maritim di Indonesia itu belum dikembangkan secara substansial sehingga bisnis makanan laut (*seafood*) di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam.

03. Rata-rata Capaian Output dan Outcome yang Masih Rendah

Data menunjukkan bahwa seluruh indikator sosial ekonomi dan kondisi infrastruktur daerah kepulauan tidak lebih baik dibandingkan kondisi nasional, kecuali Harapan Lama Sekolah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Beberapa tantangan tersebut menunjukkan masih diperlukannya fokus pembangunan (afirmasi) terhadap daerah kepulauan.

02. Koridor Pemerataan

melalui pendekatan koridor pemerataan untuk mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar pusat pertumbuhan, Pemerintah terus memberikan perhatian selain melalui belanja pusat, juga melalui dana transfer ke daerah. Di tahun 2021, secara perkapita dana transfer ke daerah untuk daerah-daerah kepulauan (Rp 4,4 juta) masih lebih tinggi daripada daerah non kepulauan (Rp 2,23 juta) maupun rata-rata nasional (Rp 2,38 juta). Dari aspek kebijakan, Daerah Kepulauan juga terus didukung melalui DAK reguler untuk sektor transportasi laut, dan DAK penugasan termasuk didalamnya untuk daerah berciri kepulauan. Dukungan Pemda juga diperlukan, untuk penyediaan infrastruktur perhubungan, serta menjaga sumber daya hayati terumbu karang.

KABAR DAERAH

01. Pemprov Sulawesi Utara

akan menyiapkan infrastruktur kelistrikan di daerah Kepulauan Sangihe. Rencananya, listrik di kepulauan akan menggunakan pembangkit listrik bersumber dari LNG. Rencana Pembangunan tersebut juga sudah disiapkan dengan memilih Tamako sebagai lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid, misalnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadu dengan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Pemkab Sangihe berharap, tahun 2021 ini minimal sudah ada yang beroperasi dari tiga pembangkit ini.

<https://manado.tribunnews.com/>

02. Pemkab Kep. Anambas

Bupati Anambas membuka secara resmi pelatihan pemandu wisata Diving dan Snorkeling di desa Belibak, tepatnya di Pulau Pangeran. Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk mencetak pemandu wisata laut yang handal dan profesional, sehingga dapat turut menjaga obyek wisata di 120 titik terumbu karang yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat lokal. Program ini diselenggarakan untuk menyambut kunjungan wisatawan mancanegara ke Anambas yang terus membaik/meningkat setiap tahun.

<https://anambaskab.go.id/>

03. Pemkab Bengkalis

menjalin kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melaksanakan restorasi gambut dan mangrove guna menangani abrasi yang terjadi di Pulau Ruptat dan Bengkalis. Secara total di daerah tersebut panjang pantai yang terkikis abrasi mencapai lebih dari 160 kilometer. Melalui program kerja sama ini telah dianggarkan Rp400 miliar untuk menanggulangi abrasi yang diperkirakan mencapai satu miliar per-kilometer..

<https://www.riaonline.co.id/>

04. Pemkab Natuna

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Natuna, telah meluncurkan terobosan baru yaitu warga tidak perlu lagi datang ke Kantor BP2RD di Kota Ranai. Terobosan ini dibuat karena kondisi geografis Natuna yang terdiri dari banyak pulau yang menyulitkan warga datang ke Kantor BP2RD Kota Ranai. Layanan pembayaran pajak khususnya PBB dengan aplikasi dompet digital. Dengan terobosan ini, masyarakat yang tidak patuh pajak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

<https://natunakab.go.id/>

05. Pemkab Kep. Meranti

Bagi masyarakat di Meranti, yang bersalin atau melahirkan bayi di RSUD akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Kartu Keluarga (KK) saat bayi akan keluar dari rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit telah melakukan penandatanganan kerjasama terkait adanya inovasi baru tersebut. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Akta Kelahiran. Untuk proses pengurusan administrasi tersebut orangtua bayi cukup menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, buku nikah dan KK serta surat lahir.

<https://www.goriau.com/>

06. Pemprov NTT

Provinsi NTT merupakan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang pertama kali berhasil mencapai eliminasi malaria. Ada 3 kabupaten/kota yang berhasil eliminasi malaria yakni Manggarai, Manggarai Timur, dan Kupang. Tiga wilayah itu berhasil mencapai eliminasi malaria selama 3 tahun. Sejak tahun 2017, berbagai upaya dilakukan pemerintah setempat seperti pemeriksaan malaria dengan menggunakan mikroskop, menggunakan tes cepat diagnostik, pendistribusian 973.800 lembar kelambu anti nyamuk kepada masyarakat sasaran, dll.

<https://mediaindonesia.com>

Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya Terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional

Pengembangan potensi kelautan dan perikanan memberikan peranan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini disebabkan produksi minyak dan gas bumi yang bersumber 70% nya dari daerah pesisir dan kepulauan (offshore) menyumbang pendapatan negara yang tidak sedikit. Belum lagi produksi maritim berupa perikanan tangkap serta potensi jasa maritim yang memungkinkan Indonesia mengembangkan wilayah ekonomi secara optimal. Walaupun potensi sektor maritim dan bahari besar, namun pemanfaatan sektor ini belum optimal mengingat kontribusi terhadap PDB nasional masih rata-rata 4%, lebih rendah dibandingkan sektor industri yang mencapai kisaran 22,4%. Oleh karena itu, **kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kinerja keuangan wilayah kepulauan yang notabene 70%nya bersifat produksi maritim dan bahari terhadap perubahan fundamental ekonomi periode 2014-2017.**

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Regresi Panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah menganalisis tingkat kinerja keuangan daerah wilayah kepulauan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi regional. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu tingkat ketergantungan daerah, tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat likuiditas daerah, serta derajat desentralisasi fiskal. Dengan adanya kajian ini, hasil analisis yang disimpulkan akan mendeteksi pengaruh kemampuan keuangan daerah dalam APBD wilayah kepulauan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut secara signifikan.

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori pengembangan wilayah yang dikonstruksikan dengan mengimplementasikan teori saling ketergantungan pertumbuhan ekonomi neoklasik dan neo Keynes. Dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan potensi pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi dengan wilayah lainnya, dimana melibatkan faktor-faktor pertumbuhan seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pertukaran barang dengan aktivitas ekonomi ini akan mendorong spesialisasi komparatif masing-masing daerah sekaligus mengembangkan wilayah tersebut secara otomatis. Teori ini digunakan oleh kajian dengan mengikutsertakan populasi sebanyak 542 daerah selama periode 2014-2017 dengan variabel dependen PDRB tingkat provinsi/kabupaten/kota.



KAJIAN PILIHAN

Hasil Penelitian

Ingdr	coef	t	P>[t]	Keputusan
indepr	4.43341	0.58	0.559	Ho diterima
capfin	-6.19670	-0.84	0.401	Ho diterima
eferat	.935309	3.05	0.002	Ho ditolak
ddf	-.1082059	8.33	0.000	Ho ditolak
inf	-5.12275	-3.09	0.002	Ho ditolak
_cons	13.9899	.157	0.000	

Hasil Pengolahan dengan STATA

Dengan rangkaian regresi panel dan pengujian ekonometrika, maka kajian ini menunjukkan bahwa selama periode 2014–2017 wilayah kepulauan mempunyai potensi sumber daya laut dan mineral yang besar. Potensi ini menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan teori pertumbuhan baru atau dikenal New Growth Theory yang digagas oleh Paul M. Romer, kemajuan ekonomi suatu wilayah tidak cukup dengan kekuatan modal finansial.

Dukungan akumulasi modal yang mengkombinasikan dengan human capital menjadi aspek penting. Faktor ini memegang peran krusial dalam mengelola modal finansial.

Hasil kajian ini dan beberapa kajian sebelumnya memberikan pemahaman bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kepulauan dengan kawasan yang berbasis agraris atau daerah urban. Salah satu faktor penentunya adalah human capital dan sebagian dari kemampuan keuangan APBD.

Kesimpulan

01



Kekuatan keuangan daerah tidak secara otomatis memacu pertumbuhan ekonomi regional pada wilayah kepulauan tanpa didukung oleh akumulasi modal human capital yang terampil dan terdidik. Dua dari empat variabel penelitian yang digunakan dalam kajian ini mempunyai kekuatan positif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Sedangkan kemandirian daerah dan ketergantungan keuangan daerah tidak menjadi penentu yang signifikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan.

02



Inovasi dan keterampilan diperlukan untuk mengelola potensi sumber daya bahari, sehingga komoditas ini mempunyai nilai tinggi. Dukungan pemerintah melalui pendanaan DAK kelautan dan perikanan merupakan upaya pemerintah dalam mendukung prioritas nasional. Hasil penelitian yang dilakukan Marpaung (2017) menemukan bahwa pendanaan DAK bidang kelautan perikanan di Kepulauan Anambas kurang efektif untuk budidaya perikanan. Sedangkan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan masuk dalam kategori cukup efektif. Budidaya perikanan di wilayah pesisir masih kurang efektif disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bagi pelaku ekonomi terhadap hama penyakit ikan. Di samping faktor tersebut, budidaya perikanan terkait dengan harga bibit termasuk mahal. Dengan demikian, masyarakat pesisir sebagai salah satu pelaku ekonomi lebih memilih untuk melakukan perikanan tangkap. Uji empiris pada wilayah kepulauan memberikan hasil yang berbeda terhadap daerah yang bercorak agraris atau perkotaan. Terlebih pada wilayah yang sudah banyak ditopang oleh peran investasi swasta. Kemampuan keuangan daerah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi regional.

Penulis: Imam Sumardjoko